

SKRIPSI
OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KORUPSI : STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN
SINGAPURA

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh:

SYAKIRAH PUTRI ENDYAN ABDAMS

2110113148

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum

Dr. Edita Elda, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No.Reg: 22/PK- IV/I/2026

**OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PENEGKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KORUPSI : STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN
SINGAPURA**

***OBSTRUCTION OF JUSTICE IN LAW ENFORCEMENT OF CORRUPTION
CRIMINAL ACTS : A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND SINGAPORE***

Disusun Oleh:
Author:

Syakirah Putri Endyan Abdams
NIM: 2110113148

Program Kekhususan (PK): Hukum Pidana (PK IV)
Concentration Program (CP): Criminal Law (CP IV)

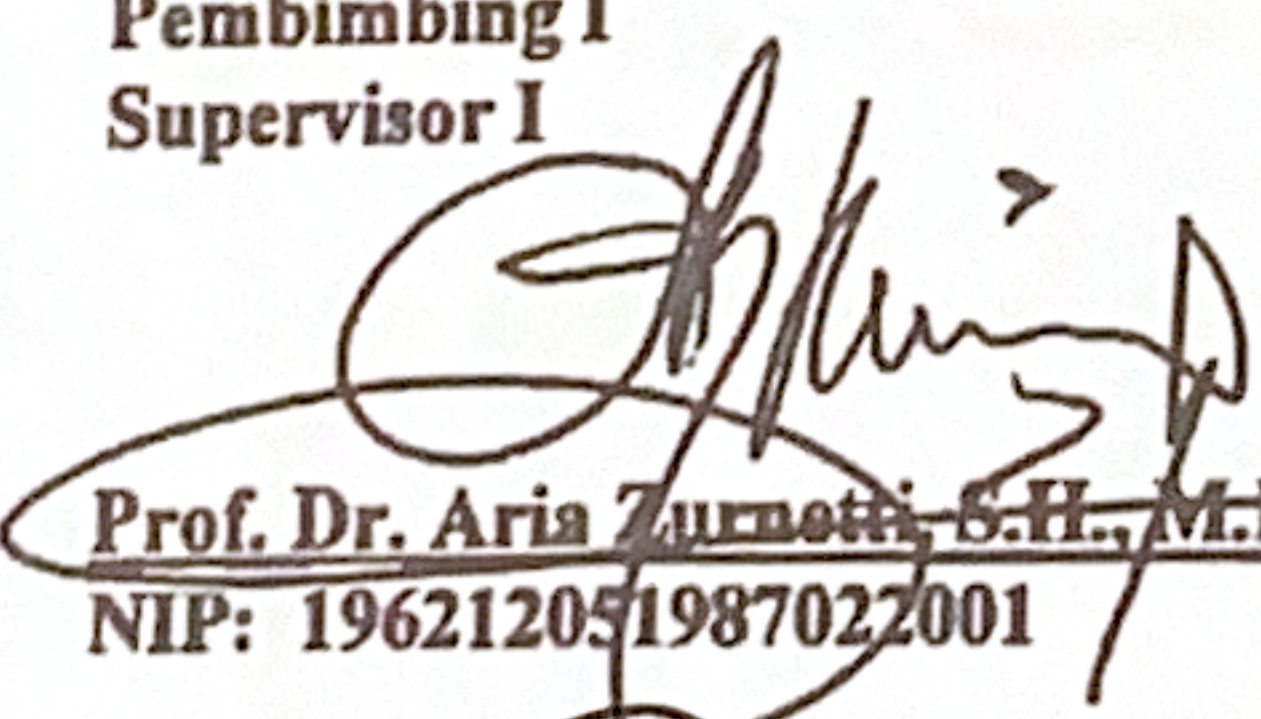
Skripsi ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada
tanggal 27 Januari 2026 dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang
Terdiri Dari:

*This Minor Thesis Was Defended in the Comprehensive Examination Session on
January 27th, 2026 and Approved by a Team of Examiners Consisting of:*

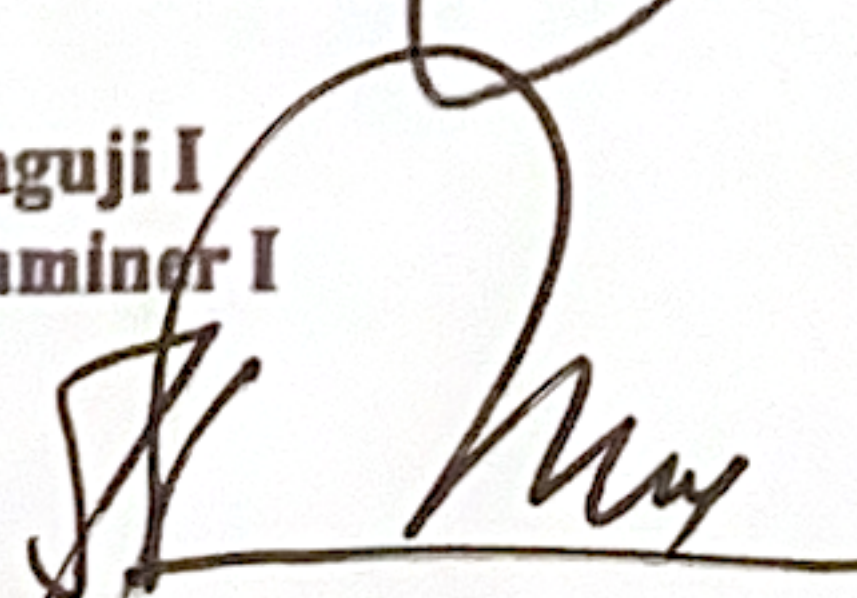
Dekan
Dean


Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP: 196807231993021001

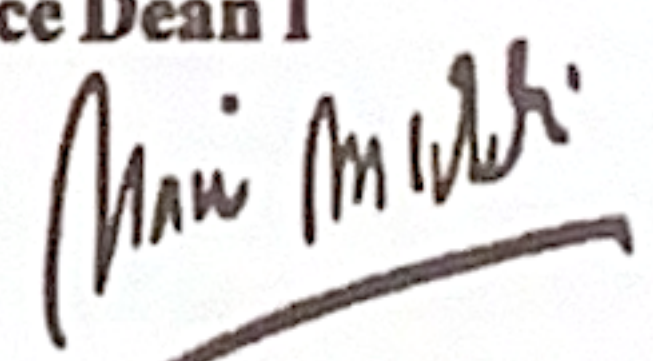
Pembimbing I
Supervisor I


Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.
NIP: 196212051987022001

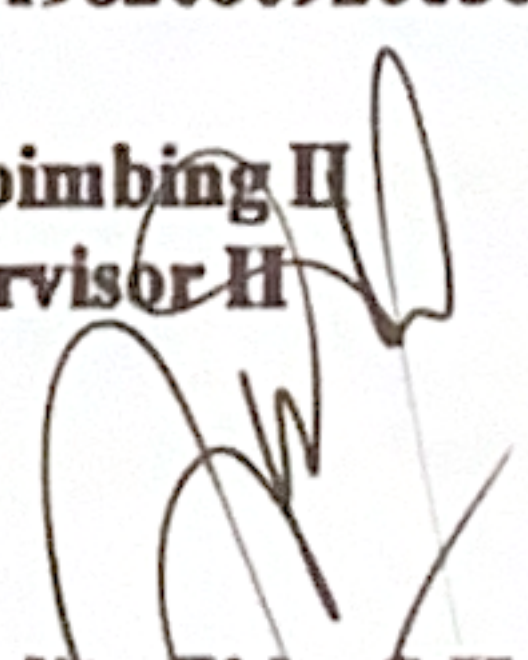
Penguji I
Examiner I


Dr. Yoserwan, S.H., M.H. LL.M.
NIP: 196212311989011002

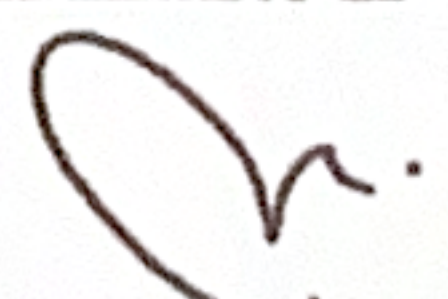
Wakil Dekan I
Vice Dean I


Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL
NIP: 198208092005012002

Pembimbing II
Supervisor II


Dr. Edita Elda, S.H., M.H.
NIP: 198601252009122004

Penguji II
Examiner II


Felia Hermayanti, S.H., M.H.
NIP: 199812082024062001

	No. Alumni Universitas	Syakirah Putri Endyan Abdams.	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/ 12 Mei 2003 b. Nama Orangtua : Rovandy Abdams, Yanti Purnamasari c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP 2110113148	f. Tanggal Lulus : 27 Januari 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 5 Bulan i. IPK : 3.76 j. Alamat : Serang, Banten	

OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PENEGKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI : STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN SINGAPURA

(Syakirah Putri Endyan Abdams, 2110113148, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2026)

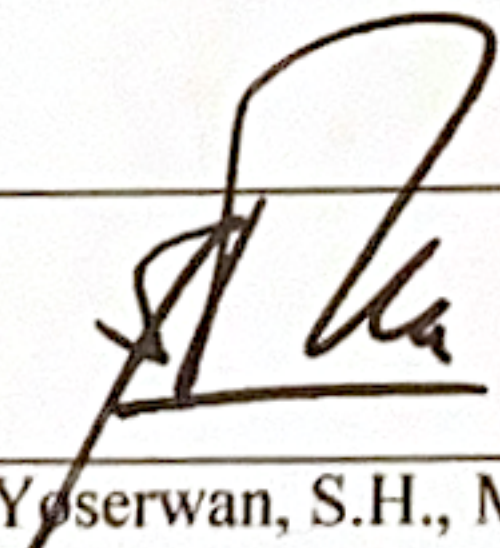
ABSTRAK

Obstruction of Justice merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan rumusan Pasal 21 UU PTPK yang mengatur tentang tindakan "mencegah, merintangi, atau menggagalkan" proses hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan subjektivitas dalam penafsiran aparat penegak hukum dan menimbulkan ketidakadilan serta diskriminasi dalam penerapan hukum. Rumusan masalah mencakup bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana *Obstruction of Justice* di kedua negara, bagaimanakah penerapan *Obstruction of Justice* tersebut dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura, serta apa sajakah yang menjadi kendala dan upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, perbandingan hukum, serta wawancara kepada aparat penegak hukum sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur *Obstruction of Justice* dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun norma tersebut masih mengandung ketidakjelasan definisi istilah kunci seperti "mencegah", "merintangi", dan "menggagalkan" yang menimbulkan tafsir subjektif oleh aparat penegak hukum. Singapura menerapkan pengaturan lebih spesifik dan sistematis pada *Section 204A Penal Code* dengan sanksi tegas dan didukung oleh lembaga independen CPIB yang efektif. Inkonsistensi dalam penerapan *Obstruction of Justice* di Indonesia memiliki dampak yang sangat merusak terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang menciptakan krisis kepercayaan fundamental terhadap integritas institusi penegak hukum. Sebaliknya, Singapura menunjukkan bahwa penerapan hukum yang konsisten, tegas, dan tanpa pandang bulu terhadap status pelaku bahkan terhadap menteri dan pejabat kepolisian justru memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penegakan hukum *Obstruction of Justice* di Indonesia menghadapi kendala utama berupa ambiguitas Pasal 21 UU PTPK yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi advokat dalam menjalankan pembelaan dan kesulitan hakim dalam menentukan kriteria objektif karena tidak adanya pedoman teknis yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan revisi rumusan pasal agar lebih operasional dan spesifik, penerbitan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung guna memberikan acuan dalam membedakan *Obstruction of Justice* dan hak pembelaan yang sah, serta pengaturan perlindungan hukum bagi profesi yang rentan kriminalisasi.

Kata Kunci: *Obstruction of Justice*; Penegakan Hukum; Tindak Pidana Korupsi; Indonesia; Singapura.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 27 Januari 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr. Yoserwan, S.H., M.H. LL.M.	Felia Hermayanti, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Syakirah Putri Endyan A.	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Jakarta/ 12 Mei 2003 b. Parents' Name : Rovandy Abdams, Yanti Pumamasari c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. Student ID : 2110113148	f. Graduation Date : January 27th, 2026 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 4 Years 5 Month i. GPA : 3.76 j. Address : Serang, Banten	

**OBSTRUCTION OF JUSTICE IN LAW ENFORCEMENT OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS :
A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND SINGAPORE**

(Syakirah Putri Endyan Abdams, 2110113148, Concentration Program Criminal Law (CP IV), Faculty of Law, Andalas University, 2026)

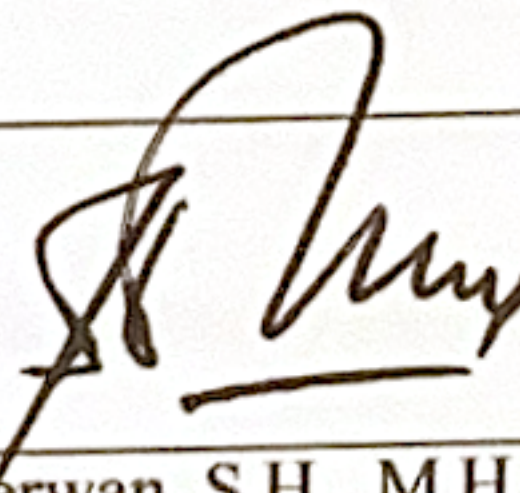
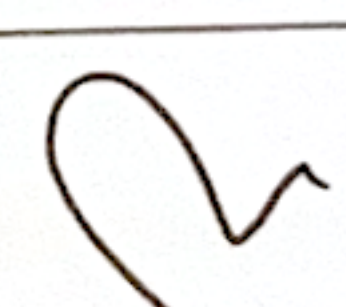
ABSTRACT

Obstruction of Justice is an act of someone who obstructs the legal process. The main problem lies in the unclear formulation of Article 21 of the PTPK Law, which regulates actions that "prevent, obstruct, or thwart" the legal process, either directly or indirectly. This leads to subjectivity in the interpretation of law enforcement officials and gives rise to injustice and discrimination in the application of the law. The problem formulation includes how the regulation of Obstruction of Justice crimes in the two countries compares, how the concept is applied in corruption cases in Indonesia and Singapore, and what are the obstacles and efforts in overcoming the obstacles to law enforcement of Obstruction of Justice in corruption crimes in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory approach, case studies, legal comparisons, and interviews with law enforcement officials as supporting data. The research results show that Indonesia regulates Obstruction of Justice in Article 21 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, but the norm still contains unclear definitions of key terms such as "preventing", "obstructing", and "thwarting" which give rise to subjective interpretations by law enforcement officials. Singapore applies more specific and systematic regulations in Section 204A of the Penal Code with strict sanctions and is supported by an effective independent institution, the CPIB. Inconsistencies in the application of Obstruction of Justice in Indonesia have had a devastating impact on public trust in the justice system, creating a fundamental crisis of confidence in the integrity of law enforcement institutions. Conversely, Singapore demonstrates that consistent, firm, and impartial application of the law, regardless of the status of the perpetrator, even to ministers and police officials, actually strengthens public trust in the justice system. The enforcement of the Obstruction of Justice law in Indonesia faces a major obstacle in the form of the ambiguity of Article 21 of the PTPK Law which creates legal uncertainty for advocates in carrying out defense and difficulties for judges in determining objective criteria due to the absence of consistent technical guidelines. This study recommends revising the article to make it more operational and specific, issuing technical guidelines by the Supreme Court to provide a reference for distinguishing between Obstruction of Justice and the right to legitimate defense, and establishing legal protections for professions vulnerable to criminalization.

Keywords: *Obstruction of Justice; Law Enforcement; Corruption; Indonesia; Singapore.*

This minor thesis has defended in front of the examiner team at , January 27th 2026.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	Dr. Yoserwan, S.H., M.H. LL.M..	Felia Hermayanti, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Criminal Law: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: